

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*)

A. Pengertian Difusi Inovasi

Gagasan awal mengenai teori difusi inovasi dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20, kurang lebih pada tahun 1930-an, saat Gabriel Tarde seorang sosiolog berkebangsaan Perancis, memperkenalkan konsep kurva difusi berbentuk huruf S, yang dikenal dengan istilah *S-shaped diffusion curve*. Secara garis besar, kurva ini menjelaskan proses adopsi suatu inovasi oleh individu maupun kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam kurva tersebut terdapat dua sumbu utama: satu sumbu merepresentasikan tingkat atau laju adopsi, sedangkan sumbu lainnya merepresentasikan dimensi waktu.

Secara etimologis, Difusi Inovasi terbentuk dari gabungan dua kata, yakni difusi dan inovasi. Rogers (dalam Ananda & Amiruddin, 2017:67), mendefinisikan difusi sebagai proses tersebarnya suatu inovasi melalui saluran komunikasi tertentu dalam kurun waktu tertentu, hingga akhirnya dapat diadopsi oleh para anggota dalam sistem sosial tertentu. Adapun inovasi didefinisikan sebagai ide, metode, atau objek yang dinilai baru, baik oleh individu, organisasi, maupun sistem sosial secara keseluruhan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difusi dimaknai sebagai proses menyebar atau merembesnya suatu unsur baik berupa kebudayaan, teknologi, maupun ide dari satu pihak menuju pihak lain. Sementara itu, inovasi diartikan sebagai upaya pemasukan atau pengenalan hal-hal baru yang bersifat pembaruan (Muntaha & Amin, 2023).

Konsep difusi inovasi kemudian semakin dikenal luas berkat Everett Rogers, yang pada tahun 1962 mempublikasikan karyanya berjudul *Diffusion of Innovations*. Melalui karya tersebut, Rogers memaparkan bahwa difusi

pada dasarnya merupakan proses penyampaian atau pengomunikasian suatu inovasi melalui beragam saluran komunikasi dalam rentang waktu tertentu, yang terjadi di dalam suatu sistem sosial.

Merujuk pada penjelasan tersebut, difusi inovasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengomunikasian ide, praktik, ataupun objek yang dipandang baru oleh pihak yang menerimanya (*adopter*), baik individu maupun organisasi. Ketika sebuah gagasan baru ditemukan lalu disebarluaskan hingga akhirnya diterima atau justru ditolak, proses tersebut akan memunculkan konsekuensi tertentu yang pada akhirnya turut mendorong terjadinya perubahan sosial di tengah masyarakat (Ananda & Amiruddin, 2017:67).

Dalam penelitian ini, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dipandang sebagai sebuah inovasi, yaitu standar akuntansi baru yang diperkenalkan dan perlu diadopsi oleh koperasi simpan pinjam sebagai pengganti standar akuntansi sebelumnya. Merujuk pada teori difusi inovasi yang telah diuraikan sebelumnya, keberhasilan penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam sangat bergantung pada bagaimana inovasi tersebut dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada pengurus maupun anggota koperasi, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi yang efektif akan mempercepat proses penyebaran informasi mengenai SAK EP, sehingga dapat meningkatkan tingkat pemahaman akuntansi pengurus koperasi terhadap standar tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki, semakin besar pula peluang SAK EP untuk diterima (diadopsi) serta diterapkan secara efektif dalam praktik akuntansi koperasi.

Oleh sebab itu, teori difusi inovasi dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam, mengingat proses adopsi suatu standar baru senantiasa berkaitan erat dengan komunikasi, penyebaran, serta penerimaan inovasi oleh anggota dalam suatu sistem sosial.

B. Unsur-unsur Difusi Inovasi

Menurut Rogers (dalam Ananda & Amiruddin., 2017:67), difusi inovasi terdiri atas empat unsur pokok, yaitu:

1. Inovasi

Inovasi merujuk pada suatu ide, hasil karya, cara, atau piranti yang dinilai baru oleh individu tertentu, dimana sifat kebaruan yang relatif tergantung pada persepsi individu. Inovasi dapat berupa komponen ide semata (misalnya ideologi) maupun kombinasi ide dan objek fisik (misalnya perangkat teknologi). Inovasi yang hanya berupa ide diadopsi melalui keputusan simbolis, sedangkan inovasi yang disertai objek fisik diadopsi melalui tindakan nyata.

Dalam penelitian ini, SAK EP berperan sebagai inovasi, yaitu standar akuntansi baru yang bersifat sebagai gagasan sekaligus prosedur kerja yang perlu diadopsi oleh koperasi simpan pinjam sebagai pengganti standar sebelumnya.

2. Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi merupakan sarana penyampaian ide baru kepada masyarakat, yang terdiri atas saluran interpersonal (tatap muka, seperti rapat atau percakapan langsung) dan saluran media massa (seperti televisi, surat kabar, atau media cetak/elektronik lainnya) yang mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar.

Dalam penelitian ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada pengurus dan anggota koperasi berperan sebagai saluran komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai SAK EP, sehingga standar tersebut dapat dipahami dan diadopsi dengan baik.

3. Waktu

Waktu berperan penting dalam proses difusi, mulai dari tahap pengetahuan tentang inovasi, bujukan, keputusan, penerapan, hingga konfirmasi. Selain itu, waktu juga memengaruhi kepekaan individu terhadap inovasi (ada yang menerima lebih awal, ada yang lebih lambat) serta kecepatan penerimaan inovasi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, proses adopsi SAK EP oleh pengurus koperasi membutuhkan rentang waktu tertentu, mulai dari tahap pengenalan standar melalui sosialisasi, proses pemahaman, hingga penerapannya secara konsisten dalam praktik akuntansi koperasi.

4. Sistem Sosial

Sistem sosial mencakup tradisi, kebudayaan, kaidah, serta prinsip-prinsip yang dijunjung oleh suatu komunitas masyarakat, yang dapat memengaruhi cepat atau lambatnya proses penyebaran dan pengadopsian inovasi melalui struktur sosial, norma, peran pemimpin, maupun agen perubahan.

Dalam penelitian ini, karakteristik sistem sosial di lingkungan koperasi simpan pinjam, seperti budaya kerja, kebiasaan pencatatan keuangan, serta peran pengurus sebagai agen perubahan, turut memengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan dan penerapan SAK EP secara efektif.

C. Karakteristik Difusi Inovasi

Menurut Rogers (dalam Yola Suryafma, 2023), menjelaskan bahwa terdapat lima ciri khas inovasi yang berperan dalam menentukan laju penerimaan suatu inovasi, baik oleh perorangan maupun suatu badan atau lembaga, yakni:

1. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)

Sejauh mana suatu inovasi dinilai lebih unggul ketimbang gagasan atau cara lama yang pernah ada, itulah yang dimaksud dengan keunggulan relatif. Kian besar keunggulan yang dirasakan oleh penggunanya, kian cepat pula inovasi tersebut diterima dan diterapkan.

Terkait hal ini, keunggulan relatif dari SAK EP tercermin melalui persepsi koperasi simpan pinjam terhadap standar tersebut, apakah dipandang lebih ringkas, lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, serta lebih mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan standar akuntansi yang berlaku sebelumnya.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah tingkat keselarasan suatu inovasi dengan nilai-nilai yang dianut, pengalaman terdahulu, serta kebutuhan pihak yang akan mengadopsinya (*adopter*). Dalam penelitian ini, kesesuaian SAK EP dapat dilihat dari sejauh mana standar tersebut sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik operasional koperasi simpan pinjam, sehingga tidak bertentangan dengan praktik akuntansi yang selama ini telah berjalan.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Kerumitan mengacu pada tingkat kesulitan yang dirasakan dalam memahami maupun menggunakan suatu inovasi. Kian tinggi tingkat kerumitannya, kian lambat pula proses adopsi inovasi tersebut berlangsung. Dalam penelitian ini, tingkat kerumitan SAK EP berkaitan erat dengan tingkat pemahaman akuntansi pengurus koperasi. Semakin rumit standar tersebut dipahami, semakin besar hambatan dalam penerapannya secara efektif.

4. Kemudahan Diuji Coba (*Trialability*)

Kemudahan diuji coba adalah Sejauh mana suatu inovasi memungkinkan untuk dicoba lebih dahulu dalam skala terbatas sebelum diterapkan secara penuh, itulah yang disebut dengan kemudahan diuji coba. Dalam penelitian ini, kemudahan uji coba SAK EP dapat dilihat dari sejauh mana koperasi diberi kesempatan untuk menerapkan standar tersebut secara bertahap, misalnya melalui simulasi pencatatan atau pelatihan, sebelum diterapkan secara menyeluruh.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Kemudahan diamati adalah sejauh mana hasil dari suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah hasil inovasi diamati, semakin besar kemungkinan inovasi tersebut diadopsi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, kemudahan pengamatan hasil penerapan SAK EP dapat dilihat dari sejauh mana manfaat penerapan standar tersebut misalnya laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah dipahami dapat

dirasakan dan diamati secara langsung oleh pengurus maupun anggota koperasi.

D. Relevansi Teori Difusi Inovasi dengan penelitian

Teori difusi inovasi dipilih sebagai landasan dalam penelitian ini karena penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada koperasi simpan pinjam pada dasarnya merupakan proses adopsi inovasi, yaitu penerimaan standar akuntansi baru untuk menggantikan standar sebelumnya. Proses ini sejalan dengan unsur-unsur difusi inovasi, di mana sosialisasi berperan sebagai saluran komunikasi yang menyampaikan informasi mengenai SAK EP, sedangkan tingkat pemahaman akuntansi mencerminkan sejauh mana pengurus koperasi mampu menyerap informasi tersebut sebelum memutuskan untuk menerapkannya.

Selain itu, teori ini dipilih karena karakteristik inovasi seperti keunggulan relatif, kesesuaian, tingkat kerumitan, kemudahan uji coba, dan kemudahan pengamatan hasil turut menentukan sejauh mana SAK EP dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh koperasi. Dengan demikian, teori difusi inovasi memberikan kerangka berpikir yang tepat untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi dan tingkat pemahaman akuntansi berperan dalam memengaruhi efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam.

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam

A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga ekonomi yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana, di mana koperasi mengumpulkan simpanan dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman bagi anggota yang membutuhkan.

Menurut Mohammad Hatta dalam (Sattar, 2017:31), koperasi simpan pinjam merupakan sebuah usaha bersama yang bertujuan meningkatkan taraf

hidup ekonomi anggotanya, dengan mengedepankan semangat gotong royong dan saling membantu.

Kasmir (2018:253) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan usahanya berupa menghimpun dana dari para anggota melalui simpanan. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dijadikan modal usaha yang dikelola oleh pengurus koperasi, untuk selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Meskipun demikian, Kasmir juga mencatat bahwa tidak semua pihak sependapat dengan pengelompokan KSP sebagai lembaga pembiayaan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya anggotanya, dalam bentuk penghimpunan simpanan dan penyaluran pinjaman.

B. Fungsi dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Dalam perekonomian Indonesia, koperasi simpan pinjam memiliki fungsi dan tujuan tertentu (Westriningsih, 2016):

1. Fungsi koperasi simpan pinjam

- a) Mendayagunakan potensi yang ada pada diri anggota demi mendorong peningkatan taraf kesejahteraan hidup mereka.
- b) Memberikan wawasan dan pemahaman kepada anggota mengenai dunia perkoperasian.
- c) Kesejahteraan hidup yang adil bagi para anggota diupayakan untuk terwujud, seiring dengan tumbuhnya semangat sosial yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- d) Memperkuat posisi anggota di dalam sistem perekonomian nasional.
- e) Menjaga dan melindungi kondisi perekonomian para anggotanya.
- f) Menanamkan semangat kerja keras pada diri setiap anggota.

2. Tujuan koperasi simpan pinjam

- a) Memudahkan anggota dalam memperoleh pinjaman dengan proses yang mudah serta bunga yang ringan.
- b) Membantu anggota dalam mengembangkan usaha dan menyediakan modal yang dibutuhkan.
- c) Menghindarkan anggota dari ketergantungan pada rentenir.
- d) Mendorong kebiasaan menabung di kalangan anggota, sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan.

C. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Herawati & Sari (2021), prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, artinya siapa pun yang memenuhi syarat berhak bergabung menjadi anggota atas kemauan sendiri tanpa tekanan dari pihak mana pun.
2. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak yang setara dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi.
3. Sisa hasil usaha (SHU) dibagikan kepada anggota secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing dalam kegiatan usaha koperasi, sehingga semakin aktif seorang anggota, semakin besar pula SHU yang diterimanya.
4. Balas jasa atas modal yang ditanamkan anggota diberikan dalam jumlah yang wajar dan terbatas, mencerminkan bahwa koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada semata mengejar keuntungan finansial.
5. Koperasi dikelola secara mandiri tanpa bergantung pada pihak luar, dengan tujuan mengembangkan potensi anggota sekaligus memajukan usaha bersama.
6. Antarkoperasi menjalin kerja sama yang saling menguntungkan sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan usaha masing-masing.

7. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian diberikan secara berkelanjutan kepada anggota, agar mereka memahami tata kelola koperasi yang sehat dan bertanggung jawab.

D. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006, tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian serta perubahan anggaran dasar koperasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Di samping berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan usaha koperasi simpan pinjam turut mengacu pada Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berlaku. Anggaran Dasar merupakan aturan yang mengatur pengelolaan kehidupan organisasi koperasi serta hubungan antara koperasi dan anggotanya, guna mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang tertib. Sementara itu, Anggaran Rumah Tangga merupakan aturan yang memuat tata tertib dan tata laksana pelaksanaan kegiatan koperasi.

E. Sumber Modal Koperasi Simpan Pinjam

Layaknya badan usaha pada umumnya, koperasi juga memerlukan modal guna menunjang berjalannya kegiatan usaha. Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki bersama, koperasi simpan pinjam (KSP) dituntut untuk mengelola permodalannya secara baik demi terwujudnya kesejahteraan para anggotanya. Mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian, modal koperasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri
 - a) Simpanan Pokok
 - b) Simpanan Wajib
 - c) Dana Cadangan .
 - d) Hibah
2. Modal Pinjaman

2.1.3 Sosialisasi

A. Pengertian Sosialisasi

Charlotte Buehler (dalam Dakhi, 2022:51), menjelaskan bahwa melalui sosialisasi, seorang individu dibimbing untuk menyesuaikan pola hidup serta cara pandang kelompoknya, sehingga ia mampu berkontribusi dan menjalankan fungsinya di tengah komunitas tersebut.

Melalui sosialisasi, seseorang dibekali kompetensi, pengetahuan, dan karakter sosial yang diperlukan untuk menjalankan fungsi serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat (Larasati & Farida, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi merupakan proses memperkenalkan atau menyebarluaskan suatu hal agar diketahui, dipahami, dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga dimaknai sebagai proses pembelajaran individu dalam memahami serta menginternalisasi norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi dan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan individu dalam menjalankan perannya. Dalam penelitian ini, sosialisasi mengacu pada kegiatan penyampaian informasi mengenai SAK EP kepada pengurus koperasi agar memahami dan mampu menerapkan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Peranan Sosialisasi

Menurut Menurut Dirdjosisworo dalam Rezeki (2024), sosialisasi memiliki tiga pengertian utama, yaitu:

1. Sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan individu mempelajari serta mengadopsi cara hidup dan kebudayaan masyarakat tempat ia berada.
2. Melalui proses sosialisasi, individu memahami norma, nilai, sikap, kebiasaan, serta pola perilaku yang berlaku sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat.
3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama proses sosialisasi kemudian diintegrasikan dan dikembangkan menjadi bagian dari kepribadian individu.

C. Sumber-Sumber Sosialisasi

Berdasarkan penjelasan Badria & Diana (2018, dalam Rezeki, 2024), sosialisasi dapat dilakukan lewat beragam acara penyuluhan atau pelatihan guna menyebarkan informasi serta memperdalam wawasan audiens.

Adapun saluran informasi tersebut meliputi saluran media massa (seperti portal internet, surat kabar, dan majalah), forum edukatif berbentuk seminar atau pelatihan akuntansi, serta instansi pemerintah terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, sumber informasi juga berasal dari wadah profesi resmi yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), hingga perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pendampingan atau pelatihan.

D. Indikator Sosialisasi SAK EP

Kusuma & Lutfiany (2018) dalam Rezeki (2024), menyatakan bahwa sosialisasi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu pelaksanaan sosialisasi, tujuan sosialisasi, manfaat sosialisasi, dan media sosialisasi. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengukur variabel sosialisasi pada penelitian ini. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengukur variabel sosialisasi pada penelitian ini. Melalui indikator tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana kegiatan

sosialisasi mengenai SAK EP telah dilaksanakan, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan sosialisasi, manfaat yang dirasakan oleh pengurus koperasi setelah mengikuti sosialisasi, serta media yang digunakan dalam penyampaian informasi mengenai SAK EP. Dengan demikian, keempat indikator tersebut diharapkan mampu menggambarkan tingkat sosialisasi yang diterima oleh pengurus koperasi secara menyeluruh.

2.1.4 Pemahaman Akuntansi

A. Pengertian Pemahaman Akuntansi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Makna dasar pemahaman merujuk pada kata "paham", yang mengindikasikan kondisi tahu atau mengerti secara mendalam terhadap suatu hal. Dengan demikian, pemahaman merupakan suatu proses seseorang dalam memahami atau menguasai suatu pengetahuan secara benar. Dalam konteks akuntansi, pemahaman memiliki peranan yang penting karena akuntansi merupakan sistem yang menghasilkan informasi keuangan untuk menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu.

Secara konseptual, akuntansi dipahami sebagai disiplin ilmu yang memfasilitasi perancangan sistem informasi keuangan kuantitatif suatu entitas, serta bagaimana data tersebut disajikan kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pertimbangan ekonomi (Suwardjono ,2015 dalam Dita Andra Eny et al., 2018:2),

Di sisi lain, Sastroatmodjo & Purnawirawan (2021), menekankan aspek teknisnya, di mana akuntansi merupakan tahapan terstruktur dan sistematis yang mencakup pencatatan, pengelompokan, hingga pengikhtisaran data transaksi hingga menjadi laporan keuangan bagi pengguna informasi.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, penelitian ini memaknai pemahaman akuntansi sebagai sejauh mana seorang individu mampu mengidentifikasi, memproses, dan mempraktikkan siklus akuntansi sesuai

standar yang berlaku. Penguasaan ini mencakup aspek teoritis sekaligus keterampilan teknis dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan guna memandu proses pengambilan keputusan.

B. Indikator Pemahaman Akuntansi SAK EP

Pemahaman akuntansi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menangkap, dan menginterpretasikan makna dari materi akuntansi yang dipelajari sehingga dapat diterapkan dalam praktik. Merujuk pada pandangan Winkel (dalam Parhusip & Herawati (2020), pemahaman mencerminkan kapasitas seseorang untuk menyerap maksud dan pesan utama dari topik atau bahan ajar yang dipelajarinya. Dalam konteks akuntansi, pemahaman yang baik sangat penting, khususnya dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Tingkat pemahaman akuntansi yang memadai diharapkan dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga mampu memberikan manfaat bagi perkembangan suatu entitas usaha. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel pemahaman akuntansi dengan mengacu pada Parhusip & Herawati (2020) yang mengadaptasi indikator dari Kusuma dan Lutfiany (2018). Indikator yang digunakan meliputi: (1) memahami transaksi akuntansi, (2) adanya dokumentasi setiap transaksi, (3) memahami tahapan penyusunan laporan keuangan, (4) memahami pencatatan akuntansi, (5) memahami penyusunan laporan keuangan, dan (6) mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.1.5 Efektivitas Penerapan SAK EP

A. Pengertian Efektivitas Penerapan SAK EP

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah efektivitas berakar dari kata efektif, yang berarti mampu memberikan pengaruh, menimbulkan akibat atau kesan, serta menghasilkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan suatu usaha atau tindakan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Suatu proses dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan dampak, menghasilkan perubahan, atau mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, baik ditinjau dari aspek masukan (input), proses, maupun keluaran (Salman & Sutisna, 2025).

Selanjutnya, implementasi atau penerapan merupakan tindakan mempraktikkan teori, konsep, serta prosedur yang telah dipelajari ke dalam kondisi nyata guna mencapai target tertentu (Amaludin, 2022).

Berlandaskan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penerapan SAK EP menggambarkan sejauh mana kesuksesan koperasi dalam mempraktikkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) secara patuh, sehingga sasaran penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, serta terstandar dapat terwujud secara maksimal.

B. Indikator Efektivitas Penerapan SAK EP

Menurut pandangan Gibson (dalam Wahyuni et al., 2020), efektivitas mengimplementasikan SAK EP dapat dievaluasi melalui beberapa tolok ukur berikut:

1. Kesesuaian pencatatan: Proses pembukuan transaksi keuangan telah berpedoman penuh pada regulasi SAK EP.
2. Kelengkapan laporan keuangan: Seluruh elemen dan struktur laporan keuangan yang diwajibkan oleh SAK EP berhasil disajikan secara menyeluruh.
3. Kepatuhan penyajian laporan keuangan: Format, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam SAK EP dipatuhi secara konsisten dalam pelaporan keuangan.
4. Keandalan dan kualitas informasi keuangan: Data dan informasi yang disajikan terbukti valid, akurat, relevan, serta layak dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

2.1.6 Laporan Keuangan

A. Pengertian Laporan Keuangan

Hery (dalam Astuti et al., 2021), menjelaskan bahwa Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari tahapan pelaporan yang memuat ringkasan data keuangan pada rentang waktu tertentu. Pada hakikatnya, laporan keuangan berfungsi sebagai media komunikasi utama yang menjembatani informasi keuangan entitas dengan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kasmir (2018), mendefinisikan laporan keuangan sebagai dokumen yang memaparkan kondisi finansial suatu organisasi, baik pada titik waktu tertentu maupun sepanjang periode berjalan. Kehadiran laporan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai rekam jejak kinerja serta posisi keuangan entitas guna memandu pertimbangan para pengambil keputusan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan wujud transparansi dan tanggung jawab entitas dalam menyajikan potret finansial serta capaian kinerjanya selama periode tertentu. Informasi tersebut menjadi acuan penting bagi pelbagai pihak untuk mengevaluasi kesehatan finansial entitas sekaligus merumuskan keputusan strategis.

B. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum, penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan data mengenai capaian kinerja, posisi finansial, serta dinamika perubahan keuangan entitas yang berguna bagi para pengguna dalam merumuskan keputusan ekonomi. Secara lebih rinci, tujuan tersebut mencakup:

1. Memberikan penjelasan mengenai klasifikasi dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan.
2. Memberikan penjelasan mengenai klasifikasi serta jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan.
3. Memberikan penjelasan mengenai klasifikasi dan total pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan.

4. Memberikan penjelasan mengenai klasifikasi serta jenis dan jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan.
5. Memberikan penjelasan mengenai perubahan yang terjadi pada aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan.
6. Memberikan penjelasan mengenai informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Memberikan penjelasan mengenai kinerja manajemen perusahaan berdasarkan informasi keuangan.

2.1.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

A. Pengertian SAK EP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan pedoman pelaporan keuangan yang dikembangkan dari IFRS for SMEs, dengan menyelaraskan aspek-aspeknya sesuai kondisi serta kebutuhan domestik Indonesia. Pedoman ini dirancang khusus untuk entitas privat—yakni organisasi yang tidak menanggung akuntabilitas publik signifikan—guna menyajikan laporan keuangan bertujuan umum bagi pemangku kepentingan eksternal.

Kendati demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik tetap diperkenankan mengimplementasikan SAK EP sepanjang mengantongi izin dari regulator atau otoritas berwenang.

Bila dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS Standards, SAK EP memiliki tingkat kerumitan yang lebih rendah sehingga lebih praktis diterapkan oleh entitas privat tanpa membebani biaya maupun pengorbanan sumber daya yang besar. Bentuk penyederhanaan ini mencakup penyesuaian cakupan regulasi yang relevan untuk skala entitas privat, penerapan kebijakan akuntansi yang fleksibel, hingga penyederhanaan pada asas pengukuran dan pengungkapan. Secara keseluruhan, SAK EP memuat 35 bab yang

memetakan beragam kriteria akuntansi serta dilengkapi contoh konkret penyusunan laporan keuangan (IAI, 2025)

Kerangka SAK EP sendiri disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 30 Juni 2021. Menurut IAI (2025) standar ini ditujukan bagi entitas privat yang bebas dari kewajiban akuntabilitas publik untuk menyediakan laporan keuangan umum guna memenuhi kebutuhan informasi pihak luar.

B. Ruang Lingkup SAK-EP

SAK EP diformulasikan khusus untuk digunakan oleh lembaga yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada masyarakat umum. Agar suatu entitas dapat mengadopsi standar ini, terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi sekaligus:

1. Entitas tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara terbuka kepada publik, sehingga aktivitas usahanya tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
2. Entitas tersebut tidak berkewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak-pihak di luar lingkaran pengelolaan usaha. Adapun yang dimaksud dengan pihak eksternal dalam konteks ini mencakup para pemilik yang tidak turut campur dalam operasional sehari-hari perusahaan, para pemberi pinjaman atau kreditur, serta lembaga-lembaga yang berwenang menilai kelayakan kredit suatu entitas.

C. Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EP

Dewan Standar Akuntansi Keuangan & Ikatan Akuntan Indonesia (2021), menjelaskan mengenai laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam kerangka SAK Entitas Privat, laporan posisi keuangan menyajikan deretan pos wajib yang mencerminkan kondisi finansial entitas pada penutupan periode pelaporan. Pos-pos tersebut mencakup:

- a) Kas beserta komponen setara kas;
- b) Piutang dagang dan klaim piutang lainnya;
- c) Instrumen aset keuangan
- d) Persediaan barang;
- e) Aset tetap;
- f) Properti investasi yang dinilai bebsis harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan serta penurunan nilai;
- g) Properti investasi yang dicatat menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- h) Aset tak berwujud;
- i) Aset biologis dengan pengukuran biaya perolehan neto setelah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai;
- j) Aset biologis yang disajikan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi;
- k) Penyertaan investasi pada entitas asosiasi;
- l) Keikutsertaan investasi dalam entitas pengendalian bersama;
- m) Kewajiban/utang usaha beserta utang lainnya;
- n) Liabilitas keuangan selain yang telah disajikan pada poin (l) dan (p);
- o) Pos aset dan liabilitas untuk pajak kini;
- p) Aset maupun liabilitas pajak tangguhan yang dikelompokkan ke dalam kategori tidak lancar;
- q) Provisi;
- r) Hak kepemilikan nonpengendali yang dilaporkan terpisah dari bagian ekuitas;
- s) Porsi ekuitas yang teratribusi kepada pemilik entitas induk

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan dan beban yang diakui selama satu periode pelaporan. Sekurang-kurangnya laporan ini memuat:

- a) Penerimaan;
- b) Biaya dan beban keuangan;
- c) Proporsi laba rugi yang bersumber dari investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama berlandaskan metode ekuitas;
- d) Beban kewajiban pajak;
- e) Akumulasi nilai tunggal yang mencakup:
 - Hasil laba atau rugi bersih setelah pajak dari aktivitas operasi yang dihentikan; serta
 - Keuntungan atau kerugian pascapajak atas penilaian penurunan nilai maupun pembalikannya pada operasional yang dihentikan, baik setelah reklasifikasi ataupun pasca pelepasan aset secara neto;
- f) Hasil akhir laba atau rugi, jika entitas tidak memiliki pos penghasilan komprehensif lain;
- g) Seluruh elemen penghasilan komprehensif lain yang dikelompokkan menurut kualifikasinya, meliputi:
 - Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi pada periode mendatang;
 - Pos yang berpotensi direklasifikasi ke laporan laba rugi bila kriteria tertentu terpenuhi;
- h) Porsi penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama yang menggunakan pencatatan metode ekuitas;
- i) Akumulasi total penghasilan komprehensif atau laba rugi bersih apabila tidak terdapat komponen komprehensif lainnya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan dinamika pergeseran saldo modal entitas sepanjang periode pelaporan. Rincian informasi yang disajikan meliputi:

- a) Akumulasi penghasilan komprehensif dalam satu periode berjalan, dengan pemisahan porsi yang menjadi hak pemilik entitas induk dan porsi kepemilikan nonpengendali;
- b) Efek dari pengimplementasian kebijakan akuntansi secara retrospektif maupun penyajian ulang akibat koreksi kekeliruan pada masing-masing komponen modal;
- c) Rekonsiliasi antara posisi awal dan akhir saldo setiap komponen ekuitas yang memuat pengaruh dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, kontribusi ekuitas dari pemilik, pembagian dividen serta bentuk distribusi lainnya kepada pemilik, hingga pergeseran proporsi kepemilikan anak perusahaan yang tidak menyebabkan lepasnya pengendalian.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memaparkan dinamika pergerakan masuk dan keluar uang tunai maupun setara kas selama rentang waktu pelaporan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori kegiatan utama:

- a) Aktivitas operasi, Kegiatan operasional pokok entitas yang menjadi sumber utama penghasil modal/pendapatan;
- b) Aktivitas investasi, Transaksi yang berkaitan dengan akuisisi serta pelepasan aset jangka panjang, termasuk bentuk investasi lain di luar kategori setara kas;
- c) Kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada skala dan komposisi ekuitas serta struktur pinjaman/utang entitas.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) memuat penjelasan serta rincian tambahan yang mendukung informasi pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan penghasilan komprehensif (bila ada),

laporan gabungan laba rugi dan saldo laba (bila disajikan), laporan perubahan ekuitas, hingga laporan arus kas.

Di samping menyajikan penjabaran mendalam untuk tiap-tiap pos laporan keuangan, CALK juga memuat informasi pendukung lain yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan utama, tetapi relevan dan dibutuhkan agar para pengguna memperoleh pemahaman utuh mengenai kondisi finansial entitas.

2.1.8 Hubungan Antar Variabel

A. Hubungan Sosialisasi SAK EP Terhadap Efektivitas Penerapan SAK EP

Kelancaran dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada lembaga koperasi simpan pinjam sangat ditentukan oleh seberapa optimal sosialisasi dilakukan. Forum edukasi ini menjadi jembatan bagi jajaran pengurus untuk menyerap pengetahuan teknis dan aturan SAK EP, yang nantinya memudahkan mereka saat menyusun pelaporan keuangan. Selain itu, kegiatan ini merangsang kesiapan mental dan teknis pengurus dalam menyambut regulasi akuntansi yang baru.

Merujuk pada *Diffusion of Innovation Theory* karya Everett M. Rogers, proses adaptasi suatu pembaharuan sangat bergantung pada penyebaran informasi melalui saluran komunikasi yang tepat. Semakin masif dan jelas sosialisasi yang diselenggarakan, makin cepat pula jajaran pengurus koperasi dalam menerima, mencerna, hingga akhirnya mempraktikkan aturan SAK EP ini.

Hal ini diperkuat oleh temuan Mattoasi (2021), yang mengungkapkan bahwa sosialisasi secara nyata menyumbang dampak positif sebesar 13,9% terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi. Hasil serupa ditunjukkan oleh Oktavia & Masdiantini (2023), pada para pelaku UMKM Buleleng. Berlandaskan teori dan pembuktian tersebut, diasumsikan bahwa semakin

gencar sosialisasi SAK EP yang diterima pengurus, semakin maksimal pula efektivitas pengimplementasiannya pada koperasi simpan pinjam.

B. Hubungan Pemahaman Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan SAK EP

Kapasitas penguasaan akuntansi oleh pihak pengelola merupakan elemen kunci lain yang mendorong keberhasilan adopsi SAK EP. Pengurus yang membekali diri dengan pemahaman akuntansi yang matang akan lebih cekatan dalam mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan setiap pos transaksi sesuai dengan standar yang berlaku. Maka dari itu, penguasaan materi akuntansi yang makin tinggi akan berbanding lurus dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan koperasi.

Dalam kacamata *Diffusion of Innovation Theory* (Everett M. Rogers), pemahaman berada pada fase *knowledge* yakni tahapan di mana seseorang membedah karakteristik serta kemanfaatan suatu inovasi sebelum memutuskan untuk menerapkannya. Ketika pengurus koperasi menguasai konsep akuntansi dengan baik, peluang mereka untuk mempraktikkan SAK EP secara akurat dan konsisten akan makin terbuka lebar.

Riset dari Hitawasana et al., (2023), juga mengonfirmasi bahwa penguasaan akuntansi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas laporan keuangan koperasi di Kecamatan Buleleng. Artinya, makin baik tingkat pemahaman akuntansi pengurus, makin efektif pula penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam.

C. Hubungan Simultan Sosialisasi dan Pemahaman terhadap Efektivitas Penerapan SAK EP

Keberhasilan pengimplementasian SAK EP tidak bisa hanya mengandalkan salah satu aspek saja. Keduanya harus berjalan beriringan: sosialisasi berperan sebagai sarana penyedia wawasan, sementara pemahaman akuntansi menjadi fondasi teknis pengurus dalam mengeksekusi penyusunan laporan keuangan.

Sesuai alur *Diffusion of Innovation Theory* (Everett M. Rogers), pengadopsian hal baru diawali dari masuknya informasi (sosialisasi),

berlanjut pada penguasaan materi (*knowledge*), hingga bermuara pada eksekusi adopsi. Dengan demikian, kolaborasi antara sosialisasi yang intensif dan tingkat pemahaman yang tinggi akan secara bersama-sama mengoptimalkan efektivitas penerapan SAK EP.

2.2 Penelitian Terdahulu

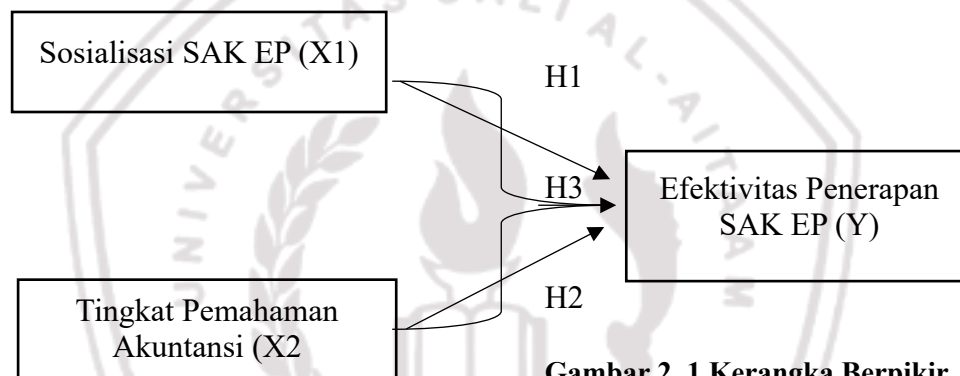
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mattoasi, 2021	Pengaruh Sosialisasi terhadap Efektivitas Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Gorontalo	Kegiatan sosialisasi terbukti memberikan kontribusi positif yang bermakna (13,9%) terhadap keberhasilan penerapan SAK EMKM. Pendampingan yang berkelanjutan dan terarah terbukti memicu kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi standar akuntansi.	Sama-sama meneliti peran sosialisasi sebagai variabel penentu efektivitas penerapan standar pelaporan keuangan.	Mattoasi dkk. meneliti UMKM dengan pedoman SAK EMKM di Kota Gorontalo, sementara riset ini menganalisis entitas koperasi di Kota Tasikmalaya menggunakan kerangka SAK EP yang lebih kompleks.
2	Prihastuti & Sukri, 2024	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Sosialisasi terhadap Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Pekanbaru	Secara terpisah, variabel pemahaman akuntansi maupun sosialisasi menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap pengimplementasian SAK EMKM pada pelaku UKM Pekanbaru.	Menggunakan kombinasi dua variabel bebas yang identik (sosialisasi dan pemahaman) untuk menguji satu variabel terikat (implementasi/ efektivitas standar).	Studi Prihastuti & Sukri mengambil subjek UMKM dengan standar SAK EMKM di Pekanbaru, sedangkan kajian ini berfokus pada koperasi di Kota Tasikmalaya berbasis SAK EP.
3	Oktavia & Masdiantini, 2023	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng	Pemahaman akuntansi beserta sosialisasi terbukti mendorong keberhasilan penerapan SAK EMKM secara signifikan, di samping variabel tingkat pendidikan yang juga berpengaruh positif.	Sama-sama menempatkan sosialisasi dan pemahaman sebagai indikator utama yang memengaruhi tingkat adopsi standar akuntansi.	Penelitian Oktavia & Masdiantini menambahkan indikator tingkat pendidikan dengan objek UMKM (SAK EMKM), sedangkan riset ini berfokus pada dua

					variabel independen utama dengan sasaran koperasi (SAK EP).
4	Rismawandi, Indah Rahayu Lestari, 2022	Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman terhadap Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Tangerang	Sosialisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan akibat kurang optimalnya penyampaian materi, sedangkan pemahaman akuntansi terbukti memberikan dampak positif signifikan.	Mengangkat dua indikator bebas yang sama (sosialisasi dan pemahaman) untuk mengukur tingkat implementasi standar.	Studi Rismawandi memanfaatkan analisis SmartPLS pada sektor UMKM (SAK EMKM), sementara riset ini berfokus menjawab celah penelitian (research gap) tersebut pada entitas koperasi berbasis SAK EP.
5	Amatiddiniyah et al., 2022	Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka	Penguasaan materi akuntansi berkorelasi kuat dengan peningkatan mutu laporan keuangan koperasi, di mana pengurus yang paham mampu menyajikan laporan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.	Sama-sama menjadikan lembaga koperasi sebagai subjek kajian dan menguji indikator pemahaman akuntansi.	Penelitian Amatiddiniyah dan Supriyatna berfokus pada standar SAK ETAP di Kabupaten Majalengka, sementara riset ini menggunakan acuan SAK EP terbaru untuk koperasi di Kota Tasikmalaya
6	Hitawasana et al., 2023	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi SDM, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi di Kecamatan Buleleng	Pemahaman akuntansi dan sosialisasi terbukti mendongkrak kualitas penyusunan laporan keuangan koperasi, sedangkan variabel SIA dan SPI tidak menunjukkan dampak bermakna.	Memiliki kesamaan dalam menjadikan koperasi sebagai objek serta menguji pemahaman dan sosialisasi sebagai variabel penentu.	Penelitian Hitawasana dan Dewi memasukkan variabel tambahan (SIA dan SPI) tanpa batasan SAK EP, sedangkan studi ini berfokus pada dua variabel utama tersebut dalam mengukur efektivitas SAK EP.
7	Nurjannah, 2024	Pengaruh Pemahaman	Kepatuhan terhadap standar akuntansi	Sama-sama menjadikan	Penelitian Nurjannah dan

		Standar Akuntansi Koperasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Wanita di Kabupaten Sumenep	terbukti meningkatkan mutu laporan keuangan koperasi wanita secara signifikan.	entitas koperasi sebagai subjek serta mengukur dampak dari penerapan standar akuntansi.	Nawirah berfokus pada Koperasi Wanita dengan SAK Koperasi di Sumenep, sedangkan penelitian ini menguji berbagai jenis koperasi di Kota Tasikmlaya menggunakan SAK EP.
--	--	--	--	---	---

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

H1: Sosialisasi SAK EP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi Simpan Pinjam.

H2: Tingkat pemahaman pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi Simpan Pinjam

H3: Sosialisasi SAK EP dan tingkat pemahaman pengurus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SAK EP pada koperasi Simpan Pinjam.